

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Saat ini, perusahaan dihadapkan dengan persaingan yang keras untuk dapat tetap eksis di pasar global. Tuntutan bagi perusahaan untuk menghasilkan produk yang bermutu bagi konsumen, tetapi juga mampu mengelola keuangan dengan baik, artinya kebijakan pengelolaan keuangan harus dapat menjamin keberlangsungan usaha perusahaan. Manajemen perusahaan bertanggungjawab dalam mengelola keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntabilitas teori agensi.

Karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat informasi dalam laporan keuangan tersebut berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Karakteristik kualitatif laporan keuangan ini berdasarkan IAI melalui PSAK No. 1 dalam bukunya SAK (2002:7) menyebutkan: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat dibandingkan.

Penyusunan laporan keuangan oleh manajemen bertujuan untuk menyampaikan informasi mengenai kondisi keuangan dan ukuran kinerja perusahaan pada periode tertentu. Salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan adalah informasi mengenai laba. Informasi laba merupakan unsur penting yang digunakan oleh para pengguna laporan keuangan baik pihak internal maupun pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pengguna pelaporan keuangan lainnya yang ingin menilai prospek net cash flow perusahaan, menjadi bagian yang penting untuk didiskusikan. Informasi laba

haruslah menggambarkan keadaan ekonomi dan keuangan perusahaan yang sebenarnya, tetapi pada kenyataannya justru sering kali pihak manajemen memanipulasi laporan keuangan dengan menaikkan laba untuk memaksimalkan kepuasan mereka sendiri.

Tindakan manajemen memanipulasi laporan keuangan dengan menaikkan laba mengindikasikan adanya praktik manajemen laba (*earnings management*) pada perusahaan. Manajemen laba merupakan upaya yang dilakukan pihak manajemen untuk melakukan intervensi dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan untuk menguntungkan dirinya sendiri, yaitu pihak perusahaan yang terkait.

Manajemen laba merupakan upaya untuk mengubah, menyembunyikan, dan merekayasa angka-angka dalam laporan keuangan dan mempermainkan metode dan prosedur akuntansi yang digunakan perusahaan (Sulityanto, 2008). Sedangkan menurut (National Association of Certified Fraud Examiners, 1993 dalam Sulistyanto, 2008:49) mengartikan manajemen laba sebagai kesalahan atau kelalaian yang disengaja dalam membuat laporan keuangan mengenai fakta material dan data akuntansi, sehingga menyesatkan ketika semua informasi itu dipakai untuk membuat pertimbangan yang pada akhirnya akan menyebabkan orang membacanya akan mengganti atau mengubah pendapat atau keputusannya. Konsep mengenai manajemen laba dapat dijelaskan dengan menggunakan pendekatan teori keagenan (*agency theory*) yakni teori yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh konflik kepentingan antara pihak yang berkepentingan (*principal*) dengan manajemen sebagai pihak yang menjalankan

kepentingan (agent). Konflik ini muncul pada saat setiap pihak berusaha untuk mencapai tingkat kemakmuran yang diinginkannya.

Sebenarnya perusahaan menghadapi suatu dorongan yang saling bertentangan pada saat melakukan manajemen laba. Pada satu sisi manajemen perusahaan ingin menampilkan kinerja keuangan yang baik dengan memaksimalkan laba yang dilaporkan kepada pemegang saham dan pengguna eksternal lainnya. Namun demikian, di sisi lain manajemen perusahaan juga menginginkan untuk meminimalkan laba kena pajak yang dilaporkan untuk keperluan pajak (Ettredge et al., 2008). Langkah yang kemudian diambil agar keduanya dapat dicapai adalah dengan memanipulasi laba menjadi lebih tinggi untuk pelaporan keuangan tapi tidak untuk pelaporan pajaknya.

Dengan adanya keinginan pihak manajemen untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Menurut Suandy (2011:16) pengertian perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan pajak agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya perencanaan pajak (tax planning) adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak.

Penelitian ini meneliti pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba karena perencanaan pajak merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi beban pajak. Upaya meminimalkan pajak sering disebut dengan perencanaan pajak (tax planning). Menurut Arles P. Ompusunggu (2011:5), Tax Planning yaitu suatu kapasitas yang dimiliki oleh wajib pajak (WP) untuk menyusun aktivitas keuangan guna mendapat pengeluaran (beban) pajak yang minimal. Umumnya

perencanaan pajak berada dalam jumlah yang minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan.

Kewajiban melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dalam SPT tercantum dalam Pasal 3 ayat 1 UU KUP yang berbunyi sebagai berikut “Setiap WP wajib mengisi SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani serta menyampaikannya ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak.” Yang dimaksud dengan benar, lengkap, dan jelas dalam mengisi SPT adalah:

1. Benar adalah benar dalam perhitungan, termasuk benar dalam penerapan ketentuan peraturan UU Pajak, dalam penulisan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Lengkap adalah menurut semua unsur-unsur yang berkaitan dengan objek pajak dan unsur-unsur lain yang harus dilaporkan dalam SPT.
3. Jelas melaporkan asal-usul/sumber objek pajak dan unsur lain yang harus diisikan dalam SPT. SPT yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan jelas tersebut wajib disampaikan ke kantor DJP tempat WP terdaftar atau dikukuhkan atau tempat lain yang ditetapkan oleh DJP, dan kewajiban penyampaian SPT oleh Pemotong atau Pemungut Pajak dilakukan untuk setiap Masa Pajak.

Perusahaan di Indonesia dalam menyusun laporan keuangan bepedoman pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Peraturan Perpajakan

Akuntansi Komersial pada umumnya mengacu pada aturan-aturan standar yang ditetapkan dalam PSAK, namun demikian untuk menjalankan fungsi budgeter dan reguler pajak, pemerintah (dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak) menetapkan beberapa aturan khusus yang berbeda dengan aturan akuntansi dalam PSAK.

Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan disebabkan karena dalam penyusunan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan estimasi akuntansi dibandingkan yang diperoleh menurut peraturan perpajakan. Semakin besarnya motivasi manajemen untuk melakukan manajemen laba akan menyebabkan semakin besarnya perbedaan antara laba akuntansi dengan laba perpajakan (Mills dan Newberry, 2001 dalam Irreza dan Yulianti, 2010).

Selain tax planning yang diduga mempengaruhi manajemen laba, beban pajak tangguhan juga dapat mempengaruhi manajemen laba. Menurut Philips, Pimcus dan Rego (2003) beban pajak tangguhan adalah beban yang timbul akibat perbedaan temporer antara laba akuntansi (yaitu laba dalam laporan keuangan untuk kepentingan pihak eksternal) dengan laba fiskal (laba yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak). Sedangkan menurut Waluyo (2014) menyatakan bahwa beban pajak tangguhan adalah jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang muncul akibat adanya pengakuan atas liabilitas atau aset pajak tangguhan.

Beban pajak tangguhan dapat digunakan untuk memprediksi manajemen laba yang digunakan oleh perusahaan dalam memenuhi dua tujuan, yaitu untuk menghindari penurunan laba dan untuk menghindari kerugian. Penelitian Philips et al., (2003) menjelaskan bahwa beban pajak tangguhan mempunyai hubungan

yang signifikan dengan perusahaan-perusahaan yang mempunyai profitabilitas melakukan manajemen laba untuk menghindari kerugian. Walaupun demikian, terdapat kemungkinan terjadi bias apabila menggeneralisasi seluruh beban pajak tangguhan sebagai komponen diskresioner. Hal ini disebabkan beban pajak tangguhan dapat timbul karena perbedaan yang tidak dapat dihindari antara standar akuntansi dan pajak.

Selain *tax planning* dan beban pajak tangguhan yang diduga mempengaruhi manajemen laba, ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi manajemen laba. Terdapat dua pendapat tentang ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Pandangan pertama, ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan yang besar. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik dan stabil agar investor dapat menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut tanpa ragu. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh para investor sehingga akan sangat berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan dalam kondisinya lebih akurat.

Pandangan kedua, ukuran perusahaan yang besar memiliki basis pemegang kepentingan yang lebih luas, sehingga berbagai kebijakan perusahaan besar akan berdampak lebih besar terhadap kepentingan publik dibandingkan dengan perusahaan kecil. Bagi investor, kebijakan perusahaan akan berimplikasi terhadap prospek *cash flow* dimasa yang akan datang. Bagi regulator (pemerintah) akan berdampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima, serta efektifitas peran pemberian perlindungan terhadap masyarakat secara umum.

Perusahaan yang berukuran besar akan memiliki dorongan yang lebih besar untuk melakukan praktik manajemen laba dibandingkan dengan perusahaan berukuran kecil, karena perusahaan besar memiliki biaya politik lebih besar, dibanding perusahaan kecil, selain itu perusahaan besar memiliki aktivitas operasional yang lebih kompleks dibandingkan perusahaan kecil, sehingga dapat memungkinkan untuk melakukan praktik manajemen laba. Dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, dimana baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar tidak menutup kemungkinan melakukan praktik manajemen laba.

Fenomena pertama dilansir (Investor.id) PT. Garuda Metalindo dari Neraca Perusahaan terlihat peningkatan jumlah hutang (bank dan lembaga keuangan). Dalam laporan keuangan nilai utang bank jangka pendek mencapai Rp 200 miliar hingga Juni 2016, meningkat dari akhir Desember 2015 senilai Rp 48 miliar. Emiten berkode saham BOLT ini memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang untuk menghindari pembayaran pajak yang harus ditanggung oleh perusahaan. Presiden Direktur Garuda Metalindo Ervin Wijaya di Jakarta Senin (8/5). Ia mengatakan, Peningkatan nilai hutang perusahaan dikarenakan Perseroan menyiapkan setidaknya Rp 350 miliar belanja modal (capital expenditure/capex) hingga pertengahan tahun depan. "Tahun ini nilainya di bawah Rp 300 miliar,".. Adapun sumber dana capex berasal dari pinjaman perbankan sekitar Rp 200 miliar dan selebihnya akan diambil dari kas internal perusahaan. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia Namun yang menarik dari kasus ini adalah banyak modus mulai dari administrasi hingga

kegiatan yang dilakukan untuk menghindari kewajiban pajak. Secara badan usaha, sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. ungkap Bambang. Lantaran modalnya 6 dimasukkan sebagai utang mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa PT Garuda Metalindo dan PT. RNI melakukan penghindaran pajak dengan cara memanfaatkan modal yang diperoleh dari pinjaman atau hutang dengan demikian perusahaan yang melakukan pembiayaan dengan utang , maka akan adanya biaya bunga yang harus dibayarkan, semakin besar hutang maka semakin besar juga biaya bunga yang ditanggung perusahaan. Biaya bunga yang besar akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak.

Fenomena kedua dilansir (Kontan.co.id) Salah satu kasus penghindaran pajak di Indonesia melibatkan PT Bentoel Internasional Investama. PT. Bentoel Internasional Investama merupakan perusahaan rokok terbesar kedua setelah HM Sampoerna di Indonesia. Menurut laporan dari Lembaga Tax Justice Network pada Rabu, 8 Mei 2019 perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama dengan cara banyak mengambil utang antara tahun 2013 dan 2015 dari perusahaan afiliasi di Belanda yaitu Rothmans Far East BV untuk pembiayaan ulang utang bank serta membayar mesin dan peralatan. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit akibatnya negara bisa menderita kerugian US\$14 juta per tahun.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) melakukan penghindaran pajak melalui PT Bentoel Internasional Investama. Pembayaran bunga yang di bayarkan akan mengurangi penghasilan kena pajak di Indonesia, sehingga pajak yang di bayarkan menjadi lebih sedikit.

Fenomena ketiga dilansir ([nasional.kontan.co.id](http://nasional.kontan.co.id)) penghindaran pajak selanjutnya dilakukan oleh PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), kasus ini terjadi karena koreksi yang dilakukan oleh Drijen Pajak terhadap nilai penjualan dan pembayaran royalti TMMIN. Sengketa ini seputar laporan pajak tahun 2008. Saat itu, pemegang saham TMMIN ialah Toyota Motor Corporation sebesar 95% dan sisanya 5% dimiliki PT. Astra International Tbk. Dalam laporan pajaknya, TMMIN menyatakan nilai penjualan mencapai Rp 32,9 triliun, namun Drijen Pajak mengoreksi nilainya menjadi Rp 34,5 triliun atau ada koreksi sebesar Rp 1,5 triliun. Dengan nilai koreksi sebesar Rp 1,5 triliun, TMMIN harus menambah pembayaran pajak sebesar Rp 500 miliar. Sebelum dipisah, margin laba sebelum pajak (gross margin) TAM mengalami peningkatan 11% hingga 14% per tahun. Namun setelah dipisah, gross margin TMMIN hanya sebesar 1,8% hingga 3% per tahun. Sedangkan di TAM, gross margin mencapai 3,8% hingga 5%. Jika gross margin TAM digabung TMMIN, persentasenya masih sebesar 7%. Artinya lebih rendah 7% dibandingkan saat masih bergabung yang mencapai 14%. Pengurangan laba tersebut karena pembayaran royalti dan pembelian bahan baku yang tidak wajar dan penjualan mobil kepada pihak terafiliasi dibawah harga pokok produksi sehingga dapat mengurangi peredaran usaha.

Berdasarkan fenomena diatas dapat dijelaskan bahwa banyak pihak dirugikan seperti negara, pemegang saham, investor dan semua pemangku kepentingan lainnya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Laba adalah Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak. Perusahaan melakukan penghematan atau penundaan pajak (pajak tangguhan) melalui kecenderungan perusahaan untuk mengurangi laba yang dilaporkan sehingga beban pajak tangguhan dapat mempengaruhi manajemen laba sebagai motivasi penghematan pajak. Pihak Manajemen berkeinginan untuk menekan dan membuat beban pajak sekecil mungkin, maka pihak manajemen cenderung untuk meminimalkan pembayaran pajak. Upaya untuk meminimalkan beban pajak ini sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*) atau *tax sheltering* (Suandy, 2008).

Faktor lain yang mempengaruhi praktik manajemen laba yaitu ukuran perusahaan. Terdapat dua pandangan tentang bentuk ukuran perusahaan terhadap manajemen laba. Pandangan pertama, ukuran perusahaan yang kecil dianggap lebih banyak melakukan praktik manajemen laba daripada perusahaan besar. Hal ini dikarenakan perusahaan kecil cenderung ingin memperlihatkan kondisi perusahaan yang selalu berkinerja baik agar investor menanamkan modalnya pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang besar lebih diperhatikan oleh masyarakat sehingga akan lebih berhati-hati dalam melakukan pelaporan keuangan sehingga berdampak perusahaan tersebut melaporkan kondisinya lebih akurat (Nasution dan Setiawan, 2007 dalam Joa, 2011). Akan tetapi, pandangan kedua memandang ukuran perusahaan mempunyai pengaruh positif terhadap manajemen laba. (Watts and Zimmerman, 1990 dalam Joa, 2011) menyatakan bahwa perusahaan besar

yang memiliki biaya politik tinggi lebih cenderung memilih metode akuntansi untuk mengurangi laba yang dilaporkan dibandingkan perusahaan-perusahaan kecil.

Ukuran perusahaan dapat menentukan banyak sedikitnya praktik manajemen laba perusahaan. Perusahaan dengan ukuran yang relatif besar akan dilihat kinerjanya oleh publik sehingga perusahaan tersebut akan melaporkan kondisi keuangannya dengan lebih berhati-hati, lebih menunjukkan keinformatifan informasi yang terkandung di dalamnya, dan lebih transparan. Oleh sebab itu, perusahaan lebih sedikit dalam melakukan praktik manajemen laba. Sedangkan perusahaan yang mempunyai ukuran yang lebih kecil mempunyai kecenderungan untuk melakukan manajemen laba dengan melaporkan laba yang lebih besar untuk menunjukkan kinerja perusahaan yang memuaskan.

Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan dalam sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016 - 2020. Pada perusahaan otomotif terdiri dari 9 perusahaan. Alasan peneliti memilih menggunakan perusahaan otomotif karena penjualan perusahaan otomotif meningkat dari tahun ke tahun dan disisi lain kebijakan yang dikeluarkan pemerintah yaitu penerapan pajak progresif yang mempengaruhi penjualan karena jika mempunyai dua kendaraan, maka besar pajak untuk kendaraan yang kedua, 2% dari Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB), kendaraan yang ketiga, 2,5% dari NJKB, kendaraan yang keempat 4% dari NJKB dan lebih dari empat tetap 4% dari NJKB. Berdasarkan uraian diatas maka penulis mengambil topik utama untuk mengadakan penelitian dengan judul “Analisis Kinerja Keuangan Perusahaan Otomotif Yang Tercatat Di Bursa Efek Indonesia”.

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa (2013) menunjukkan bahwa beban pajak tanggungan berpengaruh positif terhadap manajemen laba, perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap manajemen laba. Penelitian yang dilakukan oleh Budiman (2013) menunjukkan bahwa beban pajak tanggungan berpengaruh terhadap adanya indikasi praktik manajemen laba, akrual berpengaruh terhadap adanya indikasi praktik manajemen laba.

Hasil penelitian sebelumnya, Gunawan (2015), Ferdiansyah (2014), Jao dan Pagalang (2011), Reviani dan Sudantoko (2012) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, hal ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kristiani (2014) yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap manajemen laba. Dengan adanya *research gap* dari penelitian sebelumnya tersebut mengenai ukuran perusahaan, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai pengaruh ukuran perusahaan terhadap manajemen laba.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENGARUH *TAX PLANNING*, BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP MANAJEMEN LABA (STUDI PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2016-2020)."**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut :

1. Terdapat masalah terhadap perusahaan sub sektor otomotif yang melakukan manajemen laba.
2. Penyebab terjadinya manajemen laba terhadap perusahaan sub sektor otomotif karena hutang beban pajak yang harus dibayar perusahaan besar maka perusahaan mencari celah agar bisa melakukan tax planning.
3. Dampak yang akan ditimbulkan apabila perusahaan melakukan tax planning adalah negara mengalami kerugian.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana *Tax Planning* pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Bagaimana Beban Pajak Tangguhan pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Bagaimana Ukuran Perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
4. Bagaimana Manajemen Laba pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
5. Seberapa besar pengaruh *Tax Planning* terhadap Manajemen Laba pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

6. Seberapa besar pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
7. Seberapa besar pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
8. Seberapa besar pengaruh *Tax Planning*, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ditentukan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui *Tax Planning* pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
2. Untuk mengetahui Beban Pajak Tangguhan pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
3. Untuk mengetahui Ukuran Perusahaan pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
4. Untuk mengetahui Manajemen laba pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
5. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Tax Planning* terhadap Manajemen Laba pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek

Indonesia periode 2016-2020.

6. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
7. Untuk mengetahui besarnya pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.
8. Untuk mengetahui besarnya pengaruh *Tax Planning*, Beban Pajak Tangguhan dan Ukuran Perusahaan secara simultan terhadap Manajemen Laba pada perusahaan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020.

## **1.5 Kegunaan Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak terkait, yaitu:

### **1. Kegunaan Teoretis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu bidang studi akuntansi yang membahas mengenai pengaruh *Tax Planning*, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba

### **2. Kegunaan Praktis**

#### **a. Bagi Penulis**

Dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan, serta mengimplementasikan konsep dan teori dalam

praktek yang sebenarnya, khususnya mengenai konsep Manajemen Laba.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan tingkat Manajemen Laba.

c. Bagi pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan serta memberikan gambaran mengenai pengaruh *Tax Planning*, Beban Pajak Tangguhan, Ukuran Perusahaan dan Manajemen Laba pada Perusahaan Sub Sektor otomotif Yang Terdaftar Dalam Bursa Efek Indonesia.

## **1.6 Lokasi Dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan pertambangan sub sektor otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2020 yang dapat diakses melalui website <https://www.idx.co.id/>.

Adapun waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis dimulai pada saat disahkannya penelitian, terhitung dari tanggal 24 April 2021 s/d 24 Oktober 2021.